



KUMPULAN CERITA PERUBAHAN **KOMPAK** **KEUANGAN NEGARA** **DAN DAERAH**



Daftar Isi



**BANGGA Papua, Jalan Membangun
Generasi Emas Papua**



**Bener Meriah Terus Berbenah Guna
Meraih Dana Insentif Daerah**



**Berkat BANGGA Papua,
Anak Ini Sehat**



**DAK Fisik: Mendorong Pemerintah
Daerah Menyediakan Layanan
Dasar Berkualitas**

BANGGA Papua, Jalan Membangun Generasi Emas Papua



▲ Melalui program BANGGA Papua, mama-mama di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai mampu memberikan asupan bergizi bagi anak-anak mereka. (foto dokumentasi BaKTI)

BANGGA Papua atau Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera merupakan langkah inovatif Pemerintah Provinsi Papua dalam memanfaatkan dana Otonomi Khusus (Otsus) secara lebih efektif. BANGGA Papua menyasar anak asli Papua berusia kurang dari empat tahun sebagai penerima manfaat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak tersebut sekaligus mendukung visi-misi Pemprov Papua yang memang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya Orang Asli Papua.

Gizi buruk dan *stunting* masih menjadi ancaman yang membayangi kehidupan Orang Asli Papua (OAP). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2017, tingkat gizi kurang dan *stunting* untuk anak usia 0–59 bulan di provinsi ini masing-masing adalah 6,8% dan 15,9%, tertinggi kedua di Indonesia. Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, komitmen untuk mengatasi masalah memprihatinkan ini selaras dengan visi-misi mereka yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Caranya adalah dengan membangun generasi yang sehat dan cerdas atau “Generasi Emas” Papua yang diharapkan dapat membangun dan menjaga Tanah Papua.

Bupati Asmat, Elisa Kambu, mengamini hal ini. “Untuk membangun Papua ke depan, ini tidak ada pilihan lain. Investasinya adalah manusia. Dan manusia ini harus kita siapkan dari janin,” tegasnya. Menurut Elisa, anak dapat bertumbuh dengan baik bila menerima asupan gizi yang cukup.

Melalui pemberian dana sebesar Rp200.000 per bulan per anak, BANGGA Papua memungkinkan Orang Asli Papua memberikan anak-anak mereka asupan gizi yang cukup serta layanan kesehatan yang layak. Orang tua dan masyarakat juga diberikan pengetahuan tentang pentingnya gizi dan kesehatan anak sehingga putra-putri mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas.

BANGGA Papua memungkinkan Orang Asli Papua memberikan anak-anak mereka asupan gizi yang cukup serta layanan kesehatan yang layak.

Tahun 2017, Pemprov Papua menggandeng KOMPAK dan MAHKOTA¹ untuk mendesain program BANGGA Papua. Program ini kemudian diluncurkan pada 23 November 2017. Sekretariat Bersama (Sekber) pun dibentuk pada tingkat provinsi dan diuji cobakan di tiga kabupaten yaitu Asmat, Lanny Jaya, dan



▲ Melalui program BANGGA Papua, sebanyak 23.425 ibu/wali perempuan di Kabupaten Asmat, Lanny Jaya, dan Paniai menerima dana yang digunakan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak mereka. (foto diambil sebelum pandemi)

Paniai. Sekber bertanggung jawab menyusun kebijakan yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan program, melakukan sosialisasi dan pendataan, memverifikasi data, hingga mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh penerima manfaat.

Anggota Sekber terdiri dari perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Di Kabupaten Paniai dan Asmat, anggota Sekber mencakup kader Posyandu, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan.

KOMPAK juga mendukung penyusunan strategi komunikasi BANGGA Papua melalui kerja sama dengan Yayasan BaKTI sebagai bagian dari upaya

meningkatkan kapasitas komunikasi anggota Sekber Provinsi dan Kabupaten. KOMPAK melatih anggota Sekber agar mereka mampu memberikan pemahaman kepada para calon penerima manfaat dan masyarakat tentang pentingnya program BANGGA Papua bagi keluarga, keberlanjutan suku, dan masa depan Papua.

Anggota Sekber antara lain dibekali keterampilan komunikasi persuasif untuk menggali dukungan masyarakat terhadap program BANGGA Papua. Ini bukan perkara mudah. Kemampuan Sekber dalam melakukan sosialisasi yang masih perlu ditingkatkan, rendahnya literasi masyarakat, tempat tinggal para calon penerima manfaat yang terpencil dan tersebar, serta krisis kepercayaan terhadap program-program pemerintah menjadi tantangan utama dalam mensosialisasikan BANGGA Papua.

¹ MAHKOTA (Menuju Masyarakat Indonesia yang Kokoh Sejahtera) adalah program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang mendukung Tim Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengembangkan dan menguji cara-cara baru dalam memperbaiki kebijakan program-program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Tantangan ini semakin berat karena BANGGA Papua memperkenalkan dua “budaya” baru. Pertama, dana bantuan tidak diberikan secara tunai seperti program-program lainnya di Papua tetapi melalui transfer ke rekening bank. Kedua, penerima dana bantuan haruslah ibu dari si anak penerima manfaat, bukan ayah atau kepala kampung seperti yang lazimnya berlangsung selama ini.

Untuk itu, Sekber bekerja sama dengan berbagai komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, bidan Puskesmas dan bidan desa, ibu-ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), serta kader Posyandu. Mereka turut dilibatkan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan dana BANGGA Papua. Media sosialisasi pun didesain khusus sehingga lebih dominan dengan pendekatan visual yang selaras dengan konteks lokal. Mereka juga dilatih tentang cara menggunakan media tersebut agar dapat memberikan sosialisasi secara lebih persuasif, misalnya dengan menggunakan bahasa lokal.

Pencairan dana BANGGA Papua tahap pertama terlaksana pada Desember 2018. Penerima manfaat terdiri dari 20.356 anak usia empat tahun ke bawah yang ditransfer kepada 16.027 ibu atau wali penerima manfaat dengan total dana sebesar Rp48.279.600.000. Transfer dana tahap kedua tahun 2019



▲ Para petugas kesehatan memanfaatkan momen pencairan dana BANGGA Papua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, imunisasi, serta penimbangan berat badan dan tinggi badan. (foto diambil sebelum pandemi)

diterima oleh 31.917 anak melalui 23.425 ibu/wali dengan total dana Rp41.527.400.000.

Mengingat hanya kaum ibu yang berhak membuka rekening bank dan menerima dana, BANGGA Papua turut berkontribusi pada pemberdayaan perempuan Papua. BANGGA Papua menilai para ibu berperan penting dalam keluarga, termasuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas.

“Pembentukan SDM yang kita harapkan itu mulai dari rumah. Dan peran di rumah lebih banyak ibu. Lewat BANGGA Papua, ibu dipersiapkan untuk membuat perencanaan masa depan anaknya,” tutur Elisa Kambu.

BANGGA Papua juga mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketika ratusan anak dan ibu/wali penerima manfaat berdatangan

dari kampung-kampung jauh yang selama ini sulit dijangkau untuk mencairkan dana bantuan, kesempatan tersebut menjadi momen emas yang langsung dimanfaatkan oleh para tenaga kesehatan di Asmat untuk melayani masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan anak, pemberian imunisasi, serta pengukuran berat dan tinggi badan.

Mengingat hanya kaum ibu yang berhak membuka rekening bank dan menerima dana, BANGGA Papua turut berkontribusi pada pemberdayaan perempuan Papua. BANGGA Papua menilai para ibu berperan penting dalam keluarga, termasuk memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas. ■

“Biasanya kita susah ketemu mereka karena mereka sering ke hutan. Mumpung mereka berkumpul di waktu pencairan dana BANGGA Papua, sekalian saja kita adakan layanan kesehatan,” ujar Matea Yyongarut, petugas Puskesmas Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Asmat.

Dampak positif lainnya adalah lebih akuratnya pencatatan data Orang Asli Papua. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama menerima manfaat BANGGA Papua. NIK dibutuhkan untuk validasi kelayakan penerima manfaat sekaligus membuka rekening bank sehingga tanpa NIK, mereka tidak dapat menerima dana. Selanjutnya, pemerintah kabupaten memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk perencanaan pembangunan. Di Paniai, misalnya, data tersebut digunakan Dinas Perumahan untuk merencanakan pembangunan rumah bantuan bagi Orang Asli Papua.

“BANGGA Papua ini memberikan data yang lengkap. Manfaatnya besar untuk orang Paniai. Ke depan, pemerintah (Paniai) juga bisa jeli melihat cara-cara kerja ini yaitu bekerja berdasarkan data supaya bantuan pemerintah itu bisa sampai ke bawah tepat sasaran,” ucap Bupati Paniai, Meki Nawipa.

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi anak juga merupakan dampak positif dari program BANGGA Papua. BANGGA Papua tak hanya menyalurkan dana bantuan namun juga memberi pengetahuan sehingga para penerima manfaat paham mengapa dana yang mereka peroleh harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan gizi dan kesehatan anak-anak mereka. Meski Rp200.000 mungkin tidak cukup, setidaknya dapat menyemangati dan mendorong orang tua untuk lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan anak-anaknya.

“Kalau dulu tuh orang tua kurang perhatikan anak-anak dan anak tidak sehat. Tapi sekarang itu, makanannya teratur. Anak-anak bisa sehat. Kalau dulu setengah mati,” ujar Antonius Chowsomanan, Kepala Suku Semai, Kabupaten Asmat.

“BANGGA Papua ini memberikan data yang lengkap. Manfaatnya besar untuk orang Paniai. Ke depan, pemerintah (Paniai) juga bisa jeli melihat cara-cara kerja ini yaitu bekerja berdasarkan data supaya bantuan pemerintah itu bisa sampai ke bawah tepat sasaran.” Meki Nawipa, Bupati Paniai. ■

Para pimpinan daerah juga tak ketinggalan menunjukkan komitmennya. Bupati Asmat kerap turun langsung mensosialisasikan BANGGA Papua kepada masyarakat. Bupati Paniai mengalokasikan lebih banyak dana operasional untuk Sekber Paniai. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya mengintegrasikan BANGGA Papua dengan program perlindungan sosial yang sudah lebih dahulu diluncurkan yaitu kartu “Lanny Jaya Sehat”. Pemerintah Kabupaten Paniai bahkan mereplikasi model BANGGA Papua yang akhirnya berhasil melahirkan program perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia.

Jalan membangun Generasi Emas Papua memang masih panjang, tetapi Pemprov Papua ingin bergerak cepat. “Orang Papua itu harus bertahan hidup di Tanah Papua. Terima kasih Bapak Gubernur, karena BANGGA Papua ini, anak-anak kami bisa mendapat imunisasi, mama-mama juga jadi paham bagaimana menjaga anak-anaknya, memberikan makanan yang bergizi sehingga anak-anaknya itu bisa bertahan hidup,” tukas Vivian Gobay, anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Paniai.

Bener Meriah Terus Berbenah Guna Meraih Dana Insentif Daerah



Dana Insentif Daerah (DID) digunakan tidak saja untuk pembangunan infrastruktur, namun juga bagi sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, ▲ pengembangan ekonomi, dan perlindungan sosial.

Bener Meriah merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari kabupaten induk Aceh Tengah pada tahun 2003. Sebagai kabupaten baru, Bener Meriah membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah yang tidak bisa hanya bertumpu pada Dana Perimbangan, yaitu dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber lain untuk pembangunan wilayah baru juga masih dirasa belum cukup. Untuk itulah, Bener Meriah sangat membutuhkan pendapatan daerah yang sah lainnya termasuk dari non perimbangan seperti Dana Insentif Daerah (DID). Sejak pertama sekali DID diperkenalkan pada tahun 2011, Pemerintah Bener Meriah belum menjadikan DID sebagai salah satu target penerimaan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kondisi ini menjadikan alokasi DID di Bener Meriah tidak stabil.

Pada tahun 2017, Kabupaten Bener Meriah berhasil mendapat DID senilai Rp54.413.625.000. Jumlah itu kemudian berkurang pada tahun 2018 menjadi Rp35.750.000.000 dan terus menyusut menjadi Rp11.171.741.000 pada tahun 2019.

Kabupaten Bener Meriah sempat membatalkan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 karena tidak berhasil mendapat DID tahun anggaran (TA) 2020 yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai dana tambahan dalam membangun daerah sebelum akhirnya mendapat DID tambahan sebesar Rp9.474.092.000 pada tahun yang sama. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperbaiki indikator kinerja untuk meningkatkan penerimaan DID sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 470/21210 tentang Perbaikan Indikator Kinerja Daerah untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan DID Tahun Anggaran 2021.

Koordinasi Perencanaan Kinerja DID

Untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan DID TA 2021, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bekerjasama dengan tim Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Kinerja DID



Perbaikan kinerja DID dilakukan melalui koordinasi regular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ▲

atau biasa disebut “Tim DID”. Salah satu kunci keberhasilan pembentukan Tim DID di Bener Meriah adalah peran dari kepala daerah yang sejak awal menginisiasi dan terlibat aktif dalam memimpin langsung rapat-rapat koordinasi evaluasi capaian DID di Bener Meriah.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja DID, yaitu melalui koordinasi regular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sumber penilaian kinerja. Pemerintah kabupaten juga turut berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bener Meriah untuk penyesuaian data pembangunan daerah, serta mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan DID tahun 2021.

Dari beberapa langkah yang dilakukan tersebut akhirnya terpetakan sumber daya dan data pendukung untuk mencapai indikator prioritas perencanaan kinerja DID tahun 2021. Beberapa indikator yang digunakan dalam pemeringkatan

daerah dan alokasi DID antara lain mengenai bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi dan juga pencegahan korupsi.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja DID, yaitu melalui koordinasi regular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sumber penilaian kinerja.

Indikator tersebut yang kemudian menjadi acuan tugas Tim DID untuk membangun koordinasi ke lintas sektor dan mendorong upaya peningkatan kinerja dan penyediaan data pendukung untuk penilaian DID. “Itu bukan hasil lobi, tapi hasil kinerja. Hasil kinerja itu ada indikator yang dinilai. KOMPAK terus membantu memberikan

pemahaman tentang indikator tersebut,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bener Meriah, Drs. Khairun Aksa, S.E., M.M.

Beberapa upaya lain yang kemudian pemerintah daerah bersama KOMPAK lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yakni menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan lokakarya untuk membahas upaya perbaikan kinerja untuk mendapatkan DID, diseminasi arah kebijakan indikator kinerja penilaian DID tahun berikutnya serta menyusun rekomendasi teknis untuk memperkirakan penerimaan DID berdasarkan data-data yang telah ada, baik dari BPS maupun kementerian/ lembaga. Hasil dari FGD dan lokakarya tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyusunan mekanisme pemberian insentif kepada kampung² berbasis indikator yang sinergi dengan pemeringkatan daerah dan alokasi DID. Selain itu, KOMPAK juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar publik dan ekonomi kesejahteraan.

Lebih lanjut, koordinasi untuk menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun serta bersama-sama menyelesaikan visi dan misi kepala daerah juga dilakukan. Guna menyasar DID tersebut, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut meningkatkan pemahaman tentang

indikator dan penilaian kinerja penerimaan DID terhadap 12 kepala SKPD dan 18 pejabat fungsional.

Bener Meriah Meraih DID Terbanyak

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Bappeda dengan **Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Bappeda dengan KOMPAK untuk memperoleh DID yang sebelumnya di angka nol Rupiah akhirnya berhasil dipacu menjadi Rp63,87 miliar. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar bagi Bener Meriah di tahun 2021 sebagai salah satu peraih DID terbanyak dan peringkat utama se-Sumatera.** ■

KOMPAK untuk memperoleh DID yang sebelumnya di angka nol Rupiah akhirnya berhasil dipacu menjadi Rp63,87 miliar. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar bagi Bener Meriah di tahun 2021 sebagai salah satu peraih DID terbanyak dan peringkat utama se-Sumatera. “Ini merupakan hasil kerja tim bukan perseorangan,” kata Khairun sembari tertawa lepas.

Tak hanya itu, pada tahun yang sama Bener Meriah juga mendapat Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) 90 di bidang kesejahteraan masyarakat dengan peringkat B yang turut membantu daerah tersebut memperoleh DID dalam angka besar. Indikator lain yang menjadi nilai *plus* dalam memperoleh DID adalah menurunnya angka pengangguran.

Hal paling menentukan bagi Bener Meriah dalam perolehan DID tersebut adalah raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019.

Dari pencapaian itulah, pengampu kebijakan di Bener Meriah lebih menyadari adanya indikator-indikator yang masuk dalam penilaian Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh DID, antara lain penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu, penggunaan *e-Budgeting* dan *e-Procurement* dalam menjalankan pemerintahan, penanganan *stunting* yang berada di nilai 80 dengan peringkat B, serta persalinan di fasilitas kesehatan yang mendapat nilai 90 dengan peringkat B.

Namun Khairun mengakui perolehan DID Bener Meriah untuk tahun 2022 justru menurun jika dibandingkan alokasi tahun 2021. Menurutnya hal tersebut lumrah karena terdapat beberapa kriteria tambahan dari Kementerian Keuangan untuk mendapatkan

² Kampung adalah sebutan bagi desa di Kabupaten Bener Meriah.

DID setiap tahunnya. “Tetapi kita tetap optimis di tahun mendatang DID kita akan kembali naik. Saya yakin itu karena kita terus melakukan *update* data-data yang diperlukan untuk memperoleh DID tersebut,” kata Khairun.

Rasa optimis Khairun tersebut bukan tanpa alasan, semakin banyak SKPD di Bener Meriah yang mulai menyadari bagaimana memenuhi kriteria agar kembali memperoleh DID seperti pada tahun 2021. Lebih lanjut, Khairun juga memaparkan telah terjalinya komunikasi dan kerjasama yang baik antar lembaga di Bener Meriah. Pihaknya kini bahkan turut mendapat dukungan dari pengampu kebijakan dalam hal regulasi-regulasi yang mendukung perolehan DID guna membantu pembangunan daerah.

Alokasi DID dan Pemanfaatan DEPIK

Meskipun demikian, M. Junaidi AR, M.Si., AK.CA., Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Bener Meriah mengakui dengan raihan DID dalam jumlah besar seperti pada tahun 2021 belum menyentuh langsung masyarakat bawah. Menurutnya hal itu wajar karena yang menjadi tolok ukur program-program



Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) dimanfaatkan salah satunya untuk program penanggulangan stunting melalui kegiatan rumah gizi di Kampung Bukit Mulie, Kecamatan Timang Gajah. ▲

bersumber DID tersebut tidak semata-mata dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur namun diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi dan perlindungan sosial.

“Jadi realisasi *outcome* program saat ini memang harus betul-betul menjawab persoalan yang dibutuhkan. Kita ingin seperti itu kedepannya. Alokasi anggaran dapat langsung menjawab persoalan,” ungkap Junaidi. Junaidi menambahkan, “Semua program-program yang disusun bersama KOMPAK tersebut positif dan akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam kurun lima tahun mendatang.”

Lebih lanjut, untuk mendukung transparansi alokasi anggaran di tingkat kampung yang tepat sasaran, Kabupaten Bener Meriah bekerja sama dengan KOMPAK telah membuat model turunan DID di level lokal yaitu Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) pada tahun 2021. Landasan penerapan DEPIK adalah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK). Penerapan model ini membantu kinerja pemerintah kampung agar dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Sosialisasi DEPIK juga disinergikan dengan sosialisasi alokasi anggaran DID untuk pembangunan di masing-masing kampung sehingga masyarakat dapat mengetahui dari mana saja sumber anggaran pembangunan di kampungnya.

Berkat BANGGA Papua, Anak Ini Sehat



Marike Gobay menggendong anak BANGGA Papua. ▲

“Pesan-pesan tentang kesehatan dan gizi untuk para ibu sangat membantu kami di desa,” jelas Marike Gobay, mantan Kepala Puskesmas Distrik Bibida, Papua. “Saya memiliki harapan besar untuk program BANGGA Papua, karena saya telah melihat secara langsung bagaimana program ini membantu meningkatkan kesadaran para ibu tentang nutrisi yang baik. Mereka juga menerima uang untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak mereka.”

Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA Papua) adalah program yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk meningkatkan kesehatan anak-anak asli Papua. Program BANGGA Papua menyediakan bantuan sosial tunai bulanan sebesar Rp200.000 dan pesan-pesan kesehatan dan gizi untuk ibu anak-anak berusia 0-4 tahun.

KOMPAK dan mitra lokalnya, Yayasan BaKTI, mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan inisiatif ini dengan membantu merumuskan pedoman teknis dan strategi komunikasi untuk BANGGA Papua. MAHKOTA dan UNICEF juga menjadi bagian dari program ini. Strategi komunikasi efektif yang menjangkau penerima manfaat sangat penting untuk keberhasilan program.

Menurut Marike, banyak penduduk kampung menolak untuk berpartisipasi pada awal program, mengingat BANGGA Papua dianggap bertentangan dengan kepercayaan masyarakat. "Karena untuk menjadi penerima program BANGGA Papua harus memiliki e-KTP. Sementara untuk mendapatkan e-KTP warga harus mengikuti perekaman data biometrik. Perekaman ini yang dianggap masyarakat bertentangan dengan kepercayaan mereka," terang Marike.

Karena kepercayaan ini, banyak penduduk kampung menolak program tersebut, termasuk masyarakat Pasir Putih, tempat Marike bekerja. "Kami terus mendekati dan meyakinkan mereka. Beberapa masih menolak untuk berpartisipasi. Tapi kami terus berusaha sampai mereka akhirnya mengerti dan bersedia menjadi penerima manfaat," tambah Marike.

Sampai saat ini, lebih dari 30.000 anak saat telah mendapatkan manfaat dari program BANGGA Papua.

Bagi Marike, program ini berkontribusi pada peningkatan status kesehatan dan gizi anak-anak di wilayah tersebut. Salah satunya Egianus Kudiai yang lahir prematur, namun tumbuh menjadi balita yang sehat.

Egianus, yang sekarang berusia delapan bulan, adalah penerima manfaat BANGGA Papua.

Menurut Marike, ibu Egianus sekarang mengerti bagaimana menggunakan dana BANGGA Papua untuk kesehatan anak-anaknya. Ia menggunakan dana dari BANGGA Papua untuk membeli bahan makanan bergizi bagi dirinya dan putranya, sehingga ia mampu memberi ASI bagi anaknya.

"Anak ini lahir prematur," kata Marike sambil menunjuk fotonya. "Terima kasih kepada BANGGA Papua, anak ini sekarang sehat."

Sampai saat ini, lebih dari 30.000 anak saat telah mendapatkan manfaat dari program BANGGA Papua.

Bagi Marike, program BANGGA Papua berkontribusi pada peningkatan status kesehatan dan gizi anak-anak di wilayah tersebut.

DAK Fisik: Mendorong Pemerintah Daerah Menyediakan Layanan Dasar Berkualitas



Abdul Malik, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dengan penuh rasa bangga menunjukkan bangunan baru dan megah Puskesmas Batulanteh. "Semua alat-alatnya baru. Ada ambulans juga. Pokoknya masyarakat nanti bisa lebih nyaman berobat kesini," ujarnya.

Menurut Abdul Malik, bangunan lama Puskesmas Batulanteh sudah tidak layak digunakan lantaran berada di lereng bukit sehingga sulit dijangkau masyarakat khususnya ibu hamil, orang lanjut usia, dan anak-anak. Namun pemerintah daerah kesulitan untuk merelokasi karena minimnya anggaran. Oleh karena itu, setiap tahun, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengajukan proposal untuk mengakses dana pemerintah pusat guna pembangunan infrastruktur. Dana ini dikenal dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

"Beruntung setelah mengajukan proposal DAK Fisik kepada pemerintah pusat, usulan kegiatan perbaikan disetujui. Jadi puskesmas ini dibangun dengan menggandalkan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2019," terangnya. "Dulu, proses penyusunan proposal itu sendiri-sendiri, puskesmas tidak banyak dilibatkan dalam mendeteksi masalah. Akibatnya proposal kami ditolak ketika diverifikasi di tingkat pusat."

Pada tahun 2018, seiring dengan diluncurkannya aplikasi KRISNA-DAK untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran oleh Kementerian Keuangan, KOMPAK bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan membantu Kabupaten Sumbawa mengubah pola penyusunan proposal DAK Fisik. Salah satu bentuknya adalah dengan membentuk tim pengkaji untuk memastikan proposal yang diajukan berkontribusi pada pemenuhan standar pelayanan minimal untuk layanan dasar. Proses penyusunan proposal DAK Fisik ini menerapkan skema bottom-up yang melibatkan unit layanan seperti puskesmas dan sekolah serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan untuk memastikan kesesuaian data dan mengajukan usulan untuk proposal sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Selanjutnya Bappeda dan dinas terkait berkoordinasi dengan baik selama proses finalisasi proposal di kabupaten. Bupati Sumbawa juga terlibat dalam memonitor proses tersebut.

Lewat proses ini, penerimaan DAK Fisik bidang kesehatan Kabupaten Sumbawa meningkat dari Rp18 miliar di tahun 2018 menjadi Rp120 miliar pada tahun 2019. Sementara, total penerimaan DAK Fisik Kabupaten Sumbawa untuk 14 bidang termasuk kesehatan naik dari Rp179 miliar pada 2018 menjadi Rp274 miliar pada 2019.

Bupati Sumbawa H.M Husni Djibril mengatakan, peningkatan alokasi DAK Fisik juga mendorong perbaikan pada bidang lain termasuk pengurangan angka pengangguran, kemiskinan termasuk pengurangan

stunting dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. "Kita merasakan bagaimana dampak baiknya DAK Fisik yang turun ke Sumbawa. DAK Fisik bisa mewujudkan mimpi besar seluruh bupati di tempat lain, karena DAK ini dananya besar," pungkasnya.

"Semua alat-alatnya baru. Ada ambulans juga. Pokoknya masyarakat nanti bisa lebih nyaman berobat kesini." Abdul Malik, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.

Proses penyusunan proposal DAK Fisik Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa



